

# KONTRAK BERJANGKA

MENGABDI DENGAN INTEGRITAS



## Bappebti Genjot 30 % Kontrak Multilateral

Perdagangan Sebagai Sektor  
Penggerak Pertumbuhan dan  
Daya Saing Ekonomi, serta  
Penciptaan Kemakmuran  
Rakyat

**remarkable  
Indonesia**

Permendag  
Timah Dukung  
Bursa Komoditi  
....6

Bursa Berjangka  
Siap Tempur  
Kontrak Multilateral  
....8

BI Atur Anti  
Pencucian Uang  
Pembayaran Non  
Bank ....17



Foto : Bappebti di dalam setiap menyelenggarakan kegiatan diawali dengan melantunkan lagu kebangsaan 'Indonesia Raya'.

**P**enguatan ekonomi di dalam negeri yang ditandai dengan tingkat konsumsi tinggi, merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 6 %. Di sisi lain, yakni mendorong volume ekspor komoditi andalan ke berbagai negara-negara tujuan.

Berkaitan dengan itu, Pimpinan Kementerian Perdagangan di tahun 2013 ini menetapkan action yang menjadi tolak ukur kinerja sejumlah unit Eselon I dibawahnya. Dan tak luput Bappebti, juga kebagian tugas menjaga ritme kebijakan pemerintah. Hal itu ditunjukkan dengan mengikat Kepala Bappebti dengan enam poin kontrak kerja di bidang perdagangan berjangka komoditi.

Salah satu poin kontrak kerja Kepala Bappebti kepada Menteri Perdagangan, yakni meningkatkan volume perdagangan kontrak berjangka multilateral menjadi sebesar 30 %.

Mungkinkah? Agaknya, pertanyaan itu cukup realistis. Sebab, sepanjang ini kumulatif kontrak berjangka multilateral dari dua bursa berjangka di tanah air- Jakarta Futures Exchange (JFX) dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), tidak lebih dari 10 %. Itu pun sebagian besar diperoleh dari transaksi di BKDI, yang memang sejak berdirinya difokuskan pada kontrak berjangka multilateral. Sedangkan sisanya, didominasi kontrak berjangka bilateral berbasis sistem perdagangan alternatif (SPA).

Namun, agaknya angin segar datang dari para pelaku pasar yang menyatakan kesiapannya mendukung kontrak kerja Kepala Bappebti dengan Menteri Perdagangan itu. Hal itu terungkap saat Bappebti menyelenggarakan paparan kebijakan di bidang perdagangan berjangka komoditi di Bandung, Jabar, 22 Januari 2013. Pada sesi diskusi yang menghadirkan petinggi dari masing-masing pelaku perdagangan berjangka, mengerucut kesimpulan bahwa pencapaian kontrak multilateral sebesar 30 % yakin bisa di-

wujudkan.

Sekedar gambaran, Direktur JFX, Bihar Sakti Wibowo, mengatakan, untuk mencapai target 30 % pertanyaannya bisa? Melainkan, mau atau tidak? Sebab, kata Bihar, posisi bursa hanya sebagai arena yang menyediakan berbagai produk. "Persoalannya, perusahaan pialang mau atau tidak menawarkan kontrak berjangka multilateral. Karena dari beberapa kali mengunjungi kantor cabang perusahaan pialang di daerah, perusahaan pialang tersebut tidak menawarkan kontrak berjangka komoditi. Pada hal, di daerah itulah yang menghasilkan komoditi. Jadi, kami pun dari JFX akan merumuskan lagi sebuah kebijakan yang mengarahkan perusahaan pialang mau meningkatkan kontrak berjangka multilateral."

Kabar lain yang disajikan Redaksi pada edisi ini yakni, kebijakan Kementerian Perdagangan yang mendorong pelaku komoditi timah untuk menggunakan BKDI sebagai acuan harga komoditi timah dan sebagai salah satu sarana efektif memperoleh komoditi timah. Kebijakan itu diwujudkan dengan Permendag No. 78/M-Dag/Per/12/2012, tentang ketentuan ekspor timah. Kebijakan ini juga menjadi stimulus bagi pelaku bursa untuk mendongkrak kontrak berjangka multilateral.

Seperti diutarakan Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, Permendag ekspor timah bakal menjadi raw model untuk komoditi tambang lainnya. Hal ini pun sejalan dengan kebijakan pemerintah yang akan melakukan pembatasan ekspor komoditi tambang pada tahun 2014, dengan harapan pasar di dalam negeri semakin kuat dengan hilirisasi industri tambang.

Akhirnya, selain topik perdagangan berjangka komoditi, Redaksi juga menyajikan kabar-kabar lainnya bagi pembaca budiman yang mencintai media ini.

Salam!

KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
MINISTRY OF TRADE



KONTRAK  
BERJANGKA  
MENGAJARI DENGAN INTEGRITAS

#### Penerbit

Badan Pengawas Perdagangan  
Berjangka Komoditi

#### Penasihat/Penanggung Jawab

Syahrul R. Sempurnajaya

#### Pemimpin Redaksi

Nizarli

#### Wakil Pemimpin Redaksi

Subagiyo

#### Dewan Redaksi

Pantas Lumban Batu, Agus  
Muharni S., Harry Prihatmoko,  
Diah Sandita Arisanti, Poppy  
Juliyanti, Erni Artati, Sri  
Haryati, Rizali Wahyuni

#### Sirkulasi

Apriliyanto, Katimin, Umar  
Hasan.

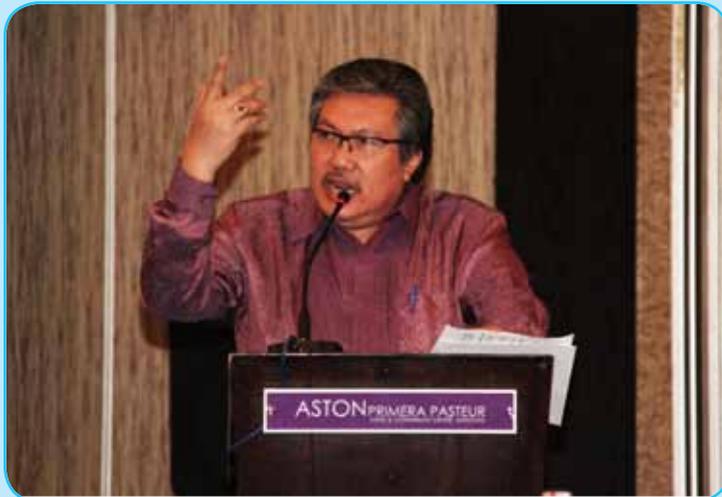
#### Alamat Redaksi

Gedung Bappebti Jl. Kramat  
Raya No. 172, Jakarta Pusat.

[www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

Redaksi menerima artikel  
ataupun opini dikirim lengkap  
dengan identitas serta foto ke  
E-mail:

[buletin@bappebti.go.id](mailto:buletin@bappebti.go.id)



## Berita Utama.....4-9

- Bappebti Genjot 30% Kontrak Multilateral
- 14 Rumusan Dongkrak Kinerja PBK
- Permendag Timah Dukung Bursa Komoditi
- Verifikasi Asal Usul Timah Mutlak

## Resi Gudang.....12-13

- Rumput Laut & Garam Bakal Jadi Primadona SRG

## Agenda Foto .....14-15

## Aktualita.....16-17

- SRG Pasbar Beroperasi, Solok dan Tanah Datar Menyusul
- SISWAS-PK Pusat Pengaduan Konsumen
- Bursa Regional Karet Optimis Terbentuk 2013
- Konmin Meredam Broker Ilegal
- BI Atur Anti Pencucian Uang Pembayaran Non Bank

## Breaknews.....26

## Analisa.....18

## Info Harga.....19

## Info SRG.....19

## Kolom.....24-25

- Demokratisasi Pasar Berujung Inovasi dan Pertumbuhan

## Berjangka...10-11

Bursa Siap Tempur  
Kontrak Multilateral



## Gudang...20-21

Denyut  
SRG Cianjur



## Kiprah...27

Pemimpin Besar  
'Lahir di Lapangan'





Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya

## Bappebti Genjot 30 % Kontrak Multilateral

*Mendongkrak kinerja industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di tanah air, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menggelar Rapat Koordinasi Kebijakan PBK tahun 2013*

**B**icara soal kinerja industri PBK, Bappebti tentu saja tidak bisa menanganinya sendirian. Banyak pihak terkait yang harus dilibatkan. Ada bursa komoditi, lembaga kliring, perusahaan pialang berjangka serta pedagang berjangka yang perlu dimaksimalkan peran dan fungsinya guna mendongkrak kinerja industri PBK di Tanah Air.

Karena itulah, Bappebti menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan PBK Tahun 2013, di Bandung, Selasa (22/01). Rakor tersebut menghadirkan seluruh pihak yang terlibat dalam industri ini. Diantaranya, Komisaris Utama dan Direksi Jakarta Futures Exchange (JFX) serta Bursa Komoditi De-

rivatif Indonesia (BKDI), Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dan Identrust Security International (ISI), perusahaan pialang berjangka, perusahaan pedagang berjangka dan asosiasi pialang serta asosiasi pedagang berjangka.

Menurut Sekretaris Bappebti, Nizarli, dalam pembukaan acara tersebut mengatakan, pertemuan ini menjadi ajang yang sangat penting dalam mengawali kegiatan pada tahun 2013. "Sekaligus dalam rangka silaturahmi untuk membicarakan perkembangan transaksi perdagangan berjangka selama ini dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan transaksi perdagangan berjangka di masa mendatang," kata Nizarli.

Sementara itu, Kepala Bappebti,

Syahrul R. Sempurnajaya mengatakan, rapat koordinasi ini, dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha tentang komitmen Bappebti kepada Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan.

"Saat ini Bappebti memiliki kontrak kerja terhadap Mendag Gita Wirjawan yang harus direalisasikan dalam program kerja tahun 2013," kata Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya.

Menurut Syahrul, terdapat 6 poin komitmen kerja Kepala Bappebti kepada Mendag Gita Wirjawan.

Poin pertama yang menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut yakni peningkatan volume transaksi kontrak berjangka multilateral minimal sebesar 30 % dibandingkan pada tahun 2012.



Untuk itu, tegas Syahrul, seluruh pihak dengan perannya masing-masing dalam tahun 2013 ini bergerak untuk dapat meningkatkan target perdagangan multilateral sebesar 30%. “Bappebti sendiri sesuai dengan tugas fungsinya akan mendorong dan memfasilitasi kebijakan yang dapat menciptakan iklim perdagangan multilateral yang baik.”

Salah satu upaya meningkatkan kontrak berjangka multilateral, kata Syahrul, harus dibentuk unit atau commodity desk di setiap perusahaan pialang berjangka. “Kebijakan ini sudah disosialisasikan sejak beberapa tahun lalu. Tetapi masih banyak perusahaan pialang yang belum membentuknya, kalau pun ada belum efektif.”

“Kami akan tegas dengan kebijakan baru ini. Karena itu, bursa pun harus ikut mendorong dan mengedukasi perusahaan pialang agar dapat meningkatkan volume transaksi kontrak berjangka multilateral,” ujar Syahrul.

### Tiga Pialang 5 %

Upaya Bappebti mendongkrak transaksi kontrak berjangka multilateral sejak tahun 2009 sudah ditegaskan dengan kebijakan minimum transaksi kontrak berjangka multilateral sebesar 5 % dari setiap perusahaan pialang berjangka. Kebijakan itu tertuang pada SK Kepala Bappebti No. 69/Per/Bappebti/2009, tentang penggerak pasar dan kewajiban transaksi kontrak berjangka di bursa berjangka.

Sekedar memberi gambaran, Syahrul R. Sempurnajaya, pada kesempatan itu mengupas kinerja perusahaan pialang berjangka terhadap kontrak berjangka multilateral. Sebagai berikut, sepanjang tahun 2012 hanya ada sebanyak tiga pe-

“  
*Kerjasama antara dua bursa berjangka itu antara lain ditujukan untuk mengangkat komoditi unggulan Indonesia di pasar internasional*  
”

rusahaan pialang berjangka yang mampu memenuhi kebijakan minimum transaksi kontrak multilateral sebesar 5 %.

Padaحال, kata Syahrul, hingga akhir tahun 2012 ada sebanyak 62 perusahaan pialang berjangka yang aktif beroperasi. Dari 62 perusahaan itu, ada sebanyak 60 perusahaan pialang yang bertransaksi kontrak berjangka multilateral.

“Namun, dari 60 perusahaan pialang itu hanya tiga perusahaan yang mampu memenuhi ketentuan minimal 5 % kontrak berjangka multilateral. Jadi, ada sebanyak 57 perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut,” jelasnya.

Adapun tiga perusahaan pialang berjangka yang memenuhi ketentuan minimum transaksi multilateral sebesar 5 % yakni, PT Soegee Futures sebesar 119.904 lot, PT Millennium Penata Futures sebesar 96.623 lot. Kedua perusahaan ini merupakan anggota JFX. Sedangkan satu perusahaan lainnya yakni PT Philips Futures yang merupakan anggota BKDI dengan capaian volume transaksi multilateral sebesar

65.167 lot.

Kendati demikian, berdasarkan data Bappebti, diketahui kontrak berjangka multilateral sepanjang tahun 2012 mencapai 1.136.336 lot, meningkat sebesar 19,45 % dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya mencapai 951.328 lot.

### CME versus BKDI

Di bagian lain kontrak kerja Kepala Bappebti terhadap Menteri Perdagangan yakni, penyelesaian makalah posisi yang menentukan roadmap menuju amalgamasi dua bursa berjangka di tanah air. Terkait itu, Syahrul mengatakan, “Mendag Gita Wirjawan hanya ingin melihat respon dari dua bursa komoditi yang ada di Indonesia, yaitu JFX dan BKDI.”

“Pak menteri sangat mengerti dua bursa berjangka ini dengan kepemilikan yang berbeda. Tujuannya, agar kompetitif kedua bursa tersebut berjalan sehat dan membuat mereka bergairah serta menunjukkan performancenya. Tapi, amalgamasi bursa tidak akan dilakukan untuk tahun ini,” terang Syahrul kepada **Buletin Kontrak Berjangka**.

Kontrak kerja yang ketiga yakni, penyelesaian makalah posisi yang menentukan roadmap untuk aliansi strategis dengan salah satu bursa berjangka dunia sebelum akhir Maret 2013. Keempat, tindak lanjut memo kesepakatan dengan bursa berjangka internasional terkait sebelum akhir tahun 2013. Rencananya, pada Mei 2013 mendatang, BKDI akan melakukan penandatanganan kerjasama dengan Chicago Mercantile Exchange (CME).

“Kerjasama antara dua bursa berjangka itu antara lain ditujukan untuk mengangkat komoditi unggulan Indonesia di pasar internasional,” kata Syahrul.

Kontrak kerja yang kelima, lanjut Syahrul, yaitu memasukkan produk-produk baru, seperti komoditi karet, kopi dan batubara ke bursa berjangka dengan semangat kristalisasi nilai yang akan mendukung stabilisasi maupun peningkatan nilai ekspor.

“Dan terakhir, yakni, laporan mingguan terkait transaksi bursa berjangka dan diseminasi harga ke Mendag dan seluruh anggota Eselon I,” tutur Syahrul R. Sempurnajaya. ▲





## 14 Rumusan Dongkrak Kinerja PBK

**O**ptimisme Bappebti dalam mendongkrak kinerja industri PBK di Indonesia, kembali ditegaskan Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya disela-sela acara Rapat Koordinasi Kebijakan PBK tahun 2013.

Syahrul mengatakan, dirinya optimis transaksi komoditi primer yang sudah ditetapkan Bappebti dari 5 % menjadi akan 30% akan tercapai. “Untuk mencapainya, antara lain dengan sentradana berjangka, perdagangan fisik komoditi dan Bappebti juga akan fokus untuk membimbing perusahaan pialang,” tegas Syahrul kepada **Buletin Kontrak Berjangka**.

Maka, untuk mencapai peningkatan kinerja industri PBK pada tahun 2013, Bappebti secara umum telah menetapkan 14 rumusan penting untuk menggapai peningkatan kinerja industri PBK tahun 2013, yakni sebagai berikut;

1) Bursa Berjangka, Kliring Berjangka, Perusahaan Pialang dan Pedagang Berjangka berkomitmen untuk dapat meningkatkan Kinerja Perdagangan Berjangka, yang pada tahun 2013 ini akan berkerja keras dan optimis untuk mencapai peningkatan transaksi multilateral

minimal 30 %;

2) Sinkronisasi dan Pemetaan program kerja bursa dan lembaga kliring serta Perusahaan dan Pedagang Berjangka Komoditi dalam mewujudkan integritas industri PBK yang baik dan dapat dipercaya oleh dunia usaha dan masyarakat;

3) Pembentukan komite yang anggotanya merupakan perwakilan dari Bursa, Kliring, Perusahaan Pialang dan Pedagang Berjangka yang memiliki Kompetensi untuk memudahkan dalam mencapai pemenuhan kewajiban Komitmen Kerja Kepala Bappebti kepada Menteri Perdagangan;

4) Pemenuhan kewajiban kecukupan persyaratan keuangan baik modal disetor maupun Ekuitas, sekitar 28 perusahaan yang belum mencukupi baik modal disetor dan Ekuitas;

5) Pemenuhan Penyusunan Pelaporan Keuangan sesuai IFRS

6) Adanya kebijakan dari seluruh pimpinan perusahaan pialang dan pedagang melaksanakan komitmen tersebut.

7) Fungsi pialang sebagai perpanjangan tangan bursa harus mampu dan memiliki integritas yang tinggi dalam membangun industri perdagangan berjangka kedepan;

8) Indonesia harus mampu sebagai leader sebagai price discovery di negara-

negara asia;

9) Perlunya dukungan stakeholder dalam hal ini perusahaan BUMN yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi agar dapat menjadi Hedger di Bursa Berjangka;

10) Dalam mendesain Kontrak Berjangka Baru, Bursa harus bekerja sama dengan Pelaku Usaha Komoditi dan Pelaku Pergudangan serta kontrak baru tersebut harus disosialisasikan kepada pelaku usaha sehingga dapat dipahami oleh seluruh Pialang maupun marketing sebelum kontrak tersebut diluncurkan;

11) Sinergi antara Bursa dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan Sosialisasi ke beberapa sentra komoditi di daerah;

12) Peran Asosiasi Pialang dan Pedagang Berjangka dirasakan kurang manfaatnya bagi Anggota Asosiasi tersebut;

13) Infrastruktur sistem transaksi yang ada di Bursa harus mampu memfasilitasi kebutuhan transaksi seluruh nasabah;

14) Usulan kebutuhan Pelaku Usaha yang diinginkan Pelaku Usaha dalam rangka tercapainya target yang telah ditetapkan didalam komitmen Kerja Kepala Bappebti kepada Mendag pada tahun 2013. ▲



Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya

# Permendag Timah Dukung Bursa Komoditi

*Nafas Permendag No. 78/M-Dag/Per/12/2012, tentang ekspor timah, dengan tegas mengatur dan melindungi industri timah di tanah air. Mampukah bursa komoditi mewujudkan pasar timah yang transparan dan berkeadilan?*

Indonesia sebagai produsen timah terbesar kedua setelah China, sebayaknya memiliki pasar timah di dalam negeri. Produksi timah Indonesia mencapai 70 % dari kebutuhan dunia. China sebagai produsen utama timah di dunia tidak melakukan ekspor, melainkan produksinya habis dikonsumsi dalam negeri. Bahkan, untuk menutupi kekurangan industri China harus impor.

Upaya pemerintah menciptakan pasar timah di dalam negeri diwujudkan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 78/M-Dag/Per/12/2012, tentang ketentuan ekspor timah. Peraturan tersebut dirilis pada 14 Desember 2012, lalu. Sedangkan berlakunya kebijakan tersebut efektif pada 1 Januari 2013.

“Indonesia sebagai produsen utama komoditi timah seharusnya bisa menciptakan pasar di dalam negeri. Dengan

“  
**Kementerian  
 Perdagangan akan  
 menjadikan  
 perdagangan timah  
 sebagai  
 raw model  
 untuk  
 komoditi tambang  
 lainnya**  
 ”

demikian harga dapat dikontrol, bukan malah pasar luar negeri yang menentukan harga jual timah,” jelas Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, disela-sela sosialisasi kebijakan timah di Hotel Borobudur, Jakarta, 29 Januari 2013. Acara itu diselenggarakan Biro Analisis Bappebti, dengan mengundang para pelaku industri timah di tanah air. Dengan harapan, bursa komoditi dapat dijadikan sebagai acuan harga ekspor timah.

Lebih jauh diutarakan Syahrul, Kementerian Perdagangan akan menjadikan perdagangan timah sebagai raw model untuk komoditi tambang lainnya. “Dengan perdagangan timah melalui bursa seperti yang diatur Permendag No 78 itu, harga menjadi transparan dan kualitas timah sudah sesuai dengan kebutuhan pasar internasional.”

“Kami sudah mengusulkan kepada Menteri Perdagangan agar pola yang sama dilakukan untuk komoditi tam-



bang lainnya. Dengan demikian, akan terkontrol dan dapat ditelusuri dari mana asal komoditi tambang tersebut. Sehingga semuanya harus transparan, karena dengan begitu kita bisa menentukan harga tinggi,” kata Syahrul.

Dalam pikiran saya, tambah Syahrul, perdagangan komoditi batubara dapat dilakukan seperti komoditi timah. “Makanya saya meminta Jakarta Futures Exchange serius mengkaji perdagangan kontrak berjangka batubara. Sehingga Kementerian Perdagangan dapat mendukung dari kebijakannya,” imbuh Syahrul R. Sempurnajaya.

## Timah Ilegal

Dirt PT Timah (Persero), Sukrisno, yang hadir di acara tersebut dengan tegas mengatakan, “kami sangat setuju dan mendukung kebijakan pemerintah yang menetapkan kebijakan ekspor timah melalui bursa berjangka komoditi. Dengan demikian asal usul komoditi timah yang diekspor jelas diketahui.”

“Kami selaku perusahaan BUMN di bidang timah pasti akan mendukung semua kebijakan pemerintah. Karena itu kami sangat setuju dan mendukung keluarnya Permendag No. 78, itu,” jelas Sukrisno.

Sejak INATIN dibentuk, PT Timah sudah mendorong perdagangan ekspor timah melalui Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI). Tetapi realitanya, pelaku pasar kurang berniat bertransaksi melalui BKDI, tambah Sukrisno.

“Jadi menurut saya, BKDI pun perlu menampung aspirasi dari semua pelaku timah. Sehingga semua pihak merasa memiliki INATIN. Kalau ada rasa memiliki itu, pasti semua akan bekerja dengan senang hati dan INATIN akan hidup,” tandas Sukrisno.

Sebab, tegas Sukrisno, masih banyak lubang-lubang ekspor timah ilegal. Sehingga para pelaku di pasar internasional lebih banyak menampung yang ilegal itu, karena harganya miring. Tetapi kalau kita semua merasa memiliki INATIN, ‘lubang-lubang tikus’ itu bisa diberantas,” tegas Sukrisno.

Banyaknya ‘jalur tikus’ yang membawa timah ilegal ke pasar luar negeri membuat pemerintah berpotensi kehilangan royalti ekspor komoditi timah per tahunnya sekitar Rp 180 miliar. Sebab itu, salah satu solusi menekan tingkat kerugian pemerintah dari royalti ekspor komoditi timah yakni ekspor timah harus diperoleh dari transaksi bursa komoditi.

“Ekspor komoditi timah ilegal per tahunnya mencapai 1.500 hingga 2.000 ton. Dengan harga pasar internasional yang saat ini berkisar US\$ 25.000 per ton, pemerintah merugi sekitar Rp 180 miliar pertahun,” jelas Rudy Irawan, Anggota Komite Timah Indonesia.

Lebih jauh diutarakan Rudy Irawan, salah satu solusi menekan tingkat penyeludupan timah dari wilayah Indonesia adalah perdagangan timah diperoleh dari transaksi bursa komoditi.

“Selain asal usul timah ekspor tersebut jelas diketahui, perhitungan royalti

ekspor timah dengan mudah dilakukan. Harga yang terjadi saat transaksi, langsung dikalikan dengan besaran royalti yang sudah ditetapkan pemerintah. Jadi dengan demikian semua jelas, transparan dan fair,” turut Rudy.

Selama ini kita- Indonesia banyak kecolongan dari ekspor timah. Produksi timah di Malaysia dan Thailand tidak pernah meningkat, tetapi komoditi timah dari dua negara itu di pasar internasional selalu tinggi, tambah Rudy. “Itu artinya, timah ilegal dari Indonesia masuk ke dua negara tersebut.”

“Dengan perdagangan timah melalui bursa berjangka, harga timah bisa melonjak sesuai dengan harapan semua pihak. Sehingga semua bisa diuntungkan. Tetapi seperti selama ini, pemerintah dirugikan dari sisi royalti, dan harga di tingkat smelter rendah,” jelas Rudy.

Di isi lain menurut Rudy Irawan, dengan perdagangan timah melalui bursa komoditi bisa ditekan volume produksi. Sehingga harga timah di pasar internasional bisa melambung tinggi. “Jadi kita tidak terlalu banyak eksploitasi tambang timah yang pada akhirnya merusak lingkungan.”

“Ekspor timah Indonesia tahun 2012 lalu, mencapai 80.000 ton. Pada hal, kalau kita hanya ekspor sekitar 30.000 hingga 50.000 ton per tahun, harga timah di pasar internasional pasti bisa mencapai US\$ 50.000 per ton,” tandas Rudy Irawan. ▲



Dirut PT Timah, Sukrisno;

## Verifikasi Asal Usul Timah Mutlak

**P**emerintah telah memperketat ekspor timah dengan keluarnya kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 04/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan. Namun, menurut Direktur Utama PT Timah (Persero), Sukrisno, selama ini masih marak ekspor timah ilegal dengan produk timah yang asal-usulnya tidak jelas.

Pada hal, pemerintah telah menunjuk PT Surveyor Indonesia (Persero) dan PT Sucofindo (Persero) sebagai badan verifikasi terhadap seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam ekspor timah. “Kalau tidak jelas asal usulnya, ya jangan diverifikasi. Kalau tidak diverifikasi maka tidak dapat juga diekspor,” kata Sukrisno kepada **Buletin Kontrak Berjangka** disela-sela acara Pertemuan Teknis Komoditi Timah, di Hotel Borobudur, di Jakarta 29 Januari 2013.

Dalam sesi diskusi Pertemuan Teknis Komoditi Timah, Sukrisno, juga mengatakan, hendaknya PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo yang sudah diberi kewenangan sebagai badan verifikasi dapat menelusuri asal-usul timah dengan jelas, sehingga tidak terjadi Illegal mining.

“Kalau timah ilegal tidak dapat diekspor maka tidak ada juga yang beli, maka penambangan liar akan berhenti,” katanya.

Lebih lanjut Sukrisno menegaskan, “PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo harus cepat melakukan tindakan, jika ada kesulitan PT Timah akan bantu.

Mereka tidak bisa, atau tidak berani, saya juga tidak tahu. Sebagai tiga perusahaan BUMN, mari kita bersama selesaikan masalah ini, daripada nanti pak Dahlan yang akan menyelesaikan.”

Sukrisno juga mengharapkan, kedepannya PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo hendaknya dapat memverifikasi sesuai dengan Permendag No.78. “Menelusuri ya,” tegas Sukrisno.

“Permendag No. 78 ini sudah cukup bagus, ini akan mengatur bagaimana ekspor timah bisa terkendali dan tertib administrasi,” kata Sukrisno.

Menurut Sukrisno, dengan penerbitan administrasi tersebut, komoditi timah yang diekspor dapat terdata. Sehingga, pemerintah akan memiliki data akurat, berapa jumlah eksport Indonesia di sektor pertambangan dan dapat meminimalisasi terjadinya illegal ekspor produk pertambangan.

“Dengan demikian, pemasukan devisa untuk negara dari timah akan lebih

banyak dan timah yang merupakan kekayaan negara dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.

Permendag No. 78 merupakan penyempurnaan dari Permendag No. 4 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan. Untuk itu, kata Sukrisno, sangat penting untuk diimplementasikan di lapangan.

“Sebaik apapun Permendag itu, tergantung dari implementasi di lapangan,” katanya.

Selama ini, pengaturan ekspor timah sudah diatur dalam Permendag No. 4. Namun, pelaksanaan dilapangan masih tidak sesuai dengan aturan. Pasalnya, banyak ditemukan komoditi timah yang asal-usulnya tidak jelas, alias produk timah ilegal.

“Nah, kalau tidak diatur mekanismenya, maka nasib Permendag No. 78 akan seperti Permendag No. 4,” imbuh Sukrisno. ▲

### Pasal Pendukung Bursa Timah

Peraturan Menteri Perdagangan No. 78/M-Dag/Per/12/2012, tentang ketentuan ekspor timah, antara lain mengatur;

- Pasal 1, Ayat (15); Bursa Timah adalah pasar timah internasional yang merupakan bagian dari Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI).
- Pasal 11, Ayat (1); timah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diperdagangkan melalui Bursa Timah. Ayat (2), timah yang diperoleh dari perdagangan melalui Bursa Timah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diekspor oleh ET-Timah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- Pasal 12, Ayat (1); harga rata-rata timah pada Bursa Timah dan atau harga rata-rata timah pada bursa timah internasional pada saat timah akan diekspor dapat digunakan sebagai dasar perhitungan iuran produksi/royalti.



Dirut JFX, Bihar Sakti Wibowo & Dirut ICDX, Megain Widjaja.

## Bursa Siap Tempur Kontrak Multilateral

*JFX dan BKDI optimis peningkatan transaksi kontrak berjangka multilateral sebesar 30 % akan tercapai di tahun 2013.*

**T**ahun 2013 sepertinya bakal menjadi tahun yang penting bagi Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Pasalnya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), memiliki komitmen untuk mendorong pelaku usaha PBK dalam meningkatkan transaksi kontrak berjangka multilateral dari minimum 5 % pada tahun 2009, menjadi 30 % di tahun 2013. Hal tersebut, merupakan bentuk kontrak kerja Bappebti kepada Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan yang harus terealisasi pada tahun ini.

Terkait itu, bagaimana respon dari 2 bursa komoditi yang ada di Indonesia? Direktur Utama Jakarta Futures Exchange (JFX), Bihar Sakti Wibowo,

“  
**Kementerian  
Perdagangan akan  
menjadikan  
perdagangan timah  
sebagai  
raw model  
untuk  
komoditi tambang  
lainnya**  
”

mengatakan, JFX optimis perusahaan pialang bisa memenuhi ketentuan dari otoritas perdagangan berjangka komoditi tersebut.

“Persoalannya adalah kemauan dari masing-masing perusahaan pialang berjangka. Karena, harus jujur diakui tidak semua perusahaan pialang berjangka menawarkan kontrak berjangka multilateral. Terutama di kantor cabang perusahaan pialang yang ada di daerah. Pada hal, kalau kita lihat para pelaku komoditi itu ada di daerah, baik sebagai pedagang komoditi maupun petaninya,” kata Bihar dalam acara Rapat Koordinasi Kebijakan PBK tahun 2013, di Bandung, Jabar, 22 Januari lalu.

Dengan batas minimum 30 % kontrak multilateral, kata Bihar, perusahaan



pialang tidak bisa main-main. Sebab, akan tampak jelas dari total volume transaksi. Selain itu, ketentuan minimum 30 %, membuat harga di bursa akan aktif dan signifikan terhadap pasar. Karena, akan banyak yang mengambil posisi harga dan dengan demikian harga akan bergerak.

“Kami siap mendukung kebijakan Bappebti itu. Dan, kami akan menyusun program edukasi dan sosialisasi kontrak berjangka multilateral terhadap perusahaan pialang berjangka,” terang Bihar.

### Tahun Restorasi

Tak mau kalah dari JFX, Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) di tahun 2013 ini juga akan lebih fokus mendukung kebijakan Bappebti yang menetapkan transaksi minimum kontrak multilateral sebesar 30 %. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama BKDI, Megain Widjaja, kepada Buletin Berjangka, di ruang kerjanya pada Januari lalu.

Walaupun, Megain mengakui, “target minimum 30 % volume transaksi multilateral itu bukanlah hal yang mudah dicapai oleh perusahaan pialang berjangka. Tapi, kami pun didorong Bappebti untuk meningkatkan volume transaksi perusahaan pialang berjangka.”

Apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan BKDI? Megain mengatakan,

kembali menggali lebih dalam potensi pasar dari sejumlah kontrak berjangka yang sudah diperdagangkan di bursa ini.

BKDI, lanjut Megain, akan lebih fokus lagi menggali potensi kontrak berjangka komoditi yang sudah diperdagangkan di BKDI. “Sebenarnya BKDI itu sudah memiliki banyak kontrak berjangka komoditi, namun belum maksimal diperdagangkan para perusahaan pialang berjangka.”

Di sisi lain, kata Megain, BKDI akan mengedukasi dan melakukan sosialisasi bagi para pelaku pasar, terutama perusahaan pialang berjangka untuk aktif menawarkan kontrak berjangka komoditi kepada masyarakat.

“Kami akan memantau terus desk commodity yang ada di perusahaan pialang berjangka anggota BKDI. Dan semua anggota bursa akan ditraining ulang,” jelas Megain.

Selain itu, tambah Megain, kami pun akan mendatangi lagi para pelaku komoditi satu per satu sehingga mereka tertarik untuk transaksi di BKDI. “Jadi para pelaku komoditi itu pun perlu di-maintenance. Dan, jujur kami katakan, inilah yang tidak dilakukan pada tahun 2012 lalu.”

Tahun 2013 untuk BKDI merupakan sebuah tahun restorasi. “Namun, untuk mencapai restorasi tersebut, kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami pun harus

didukung oleh semua pihak terkait,” pungkas Megain Widjaja.

**Jakarta Futures Exchange (JFX)**, total volume transaksi multilateral selama bulan Januari 2013 hanya mencapai 19.580 lot. Angka tersebut, merupakan total volume dari sebelas kontrak komoditi yang diperdagangkan di bursa ini.

Tencatat, volume transaksi kontrak berjangka kakao (satuan 5 ton) atau CC5 capai 4.442 lot. Sedangkan kontrak berjangka emas (satuan 1 kg) atau GOL capai 1.786 lot. Kontrak berjangka emas (satuan 100 gr) atau GOL100 sebesar 3.243 lot, dan kontrak berjangka emas (satuan 250 gr) atau GOL250 sebesar 2.686 lot.

Untuk kontrak gulir emas dalam US\$ Mini (satuan 10 troy ounce) atau GUITF capai 1.120 lot. Sementara itu, kontrak gulir emas dalam US\$ fixed rate (satuan 100 troy ounce) atau GUIH10 dan kontrak gulir emas dalam Rupiah (satuan 1000 gr) atau KGE tidak ada transaksi alias nol.

Lainnya, kontrak gulir emas dalam US\$ (satuan 100 troy ounce) atau KGEUSD capai 647 lot. Adapun kontrak gulir indeks emas (satuan Rp 10.000,-/ angka indeks) atau KIE sebesar 2.255 lot. Kemudian, kontrak berjangka olein (satuan 20 ton) atau OLE capai 2.025 lot. Dan, kontrak berjangka olein (satuan 10 ton) atau OLE10 sebesar 1.376. ▲

### Transaksi Multilateral BKDI & JFX Periode Januari 2013

**Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI)**, mencatatkan volume transaksi mencapai 71 623 lot. Angka tersebut, merupakan total volume dari enam kontrak komoditi yang diperdagangkan di bursa ini.

Tencatat, volume transaksi kontrak berjangka emas dalam satuan 100 gram/lot dan dalam mata uang rupiah atau GOLD-GR mencapai 802 lot. Untuk kontrak tunda serah emas 10 troy ounce/lot dan dalam mata uang USD atau GOLDUD sebesar 7.252 lot.

Sementara itu, volume kontrak tunda serah emas 10 troy ounce/lot dan dalam mata uang USD, dan dengan kurs rate yang sudah ditetapkan (Fixed Rate) USD 1 = IDR 10.000 atau GOLDID mencapai 95 lot. Sedangkan kontrak berjangka crude palm oil (CPO) 10 metric ton (10,000 kg/Lot) dan dalam mata uang Rupiah atau CPOTR mebukukan transaksi 63.383.

Adapun kontrak berjangka RBD palm OLEIN 10 metric ton (10,000 kg/Lot) dan dalam mata uang Rupiah atau OLE-INTR mencapai 91. Dan, kontrak fisik timah 5 metric ton (5000 kg/Lot) dan dalam mata uang USD atau INATIN tidak ada transaksi alias nol.

**Jakarta Futures Exchange (JFX)**, total volume transaksi multilateral selama bulan Januari 2013 hanya mencapai 19.580 lot. Angka tersebut, merupakan total volume dari sebelas kontrak komoditi yang diperdagangkan di bursa ini.

Tencatat, volume transaksi kontrak berjangka kakao (satuan 5 ton) atau CC5 capai 4.442 lot. Sedangkan kontrak berjangka emas (satuan 1 kg) atau GOL capai 1.786 lot. Kontrak berjangka emas (satuan 100 gr) atau GOL100 sebesar 3.243 lot, dan kontrak berjangka emas (satuan 250 gr) atau GOL250 sebesar 2.686 lot.

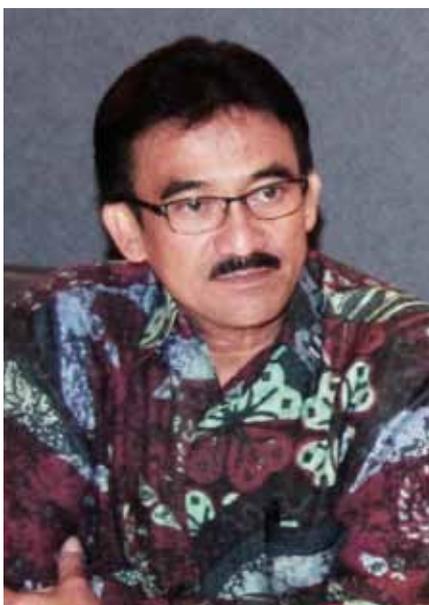
Untuk kontrak gulir emas dalam US\$ Mini (satuan 10 troy ounce) atau GUITF capai 1.120 lot. Sementara itu, kontrak gulir emas dalam US\$ fixed rate (satuan 100 troy ounce) atau GUIH10 dan kontrak gulir emas dalam Rupiah (satuan 1000 gr) atau KGE tidak ada transaksi alias nol.

Lainnya, kontrak gulir emas dalam US\$ (satuan 100 troy ounce) atau KGEUSD capai 647 lot. Adapun kontrak gulir indeks emas (satuan Rp 10.000,-/angka indeks) atau KIE sebesar 2.255 lot. Kemudian, kontrak berjangka olein (satuan 20 ton) atau OLE capai 2.025 lot. Dan, kontrak berjangka olein (satuan 10 ton) atau OLE10 sebesar 1.376. ▲



## Bakal Primadona SRG Rumput Laut & Garam

*Bappebti akan percepat implementasi SRG di beberapa daerah yang selama ini belum berjalan. Bahkan, 15 unit gudang baru siap dibangun.*



Kabag Biro Pasar Fisik & Jasa,  
Ismadjaja Toengkagie

**E**ksistensi sistem resi gudang (SRG) cukup efektif sebagai salah satu alternatif pembiayaan dan sarana tunda jual bagi petani. Kabar baiknya, menurut Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa Bappebti, Ismadjaja Toengkagie, banyak pihak terutama petani ataupun pelaku usaha sudah sangat menyadari nilai strategis yang ditawarkan dalam skema SRG.

“Sehingga, instrumen ini dipastikan akan dapat berjalan dengan optimal,” kata Ismadjaja Toengkagie dalam wawancara khusus dengan Buletin Berjangka di Jakarta, 22 Januari 2013, lalu.

Tercatat, sepanjang tahun 2012 pembangunan gudang SRG dengan menggunakan DAK Tahun Anggaran 2012 sebanyak 14 gudang di 14 kabupaten. Adapun secara keseluruhan, pada tahun

2009 hingga 2012, Bappebti bersama Pemerintah Daerah telah melakukan pembangunan 80 gudang SRG yang tersebar di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Dan untuk tahun 2013, Bappebti menargetkan akan kembali membangun 15 gudang baru lainnya yang digunakan untuk SRG.

Pada tahun 2012, Bappebti juga telah melakukan kegiatan pemetaan terhadap gudang milik swasta. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai jumlah gudang yang ada di 274 kabupaten di 16 provinsi di seluruh Indonesia yang dimiliki oleh para pelaku usaha/swasta. “Alhasil, terdapat 64 gudang yang dimiliki oleh pelaku usaha maupun koperasi yang potensial dapat



dimanfaatkan sebagai gudang SRG.”

Kendati demikian, Ismadjaja Toengkagie mengakui, beberapa gudang SRG belum dapat beroperasi sebagaimana yang diharapkan. “Untuk itu, kami bertekad akan mempercepat implementasi gudang SRG yang sudah dibangun namun belum dapat berjalan. Targetnya tahun ini sebanyak 85 gudang SRG harus sudah dapat berjalan,” kata Ismadjaja.

Selain itu, menurut Ismadjaja, peningkatan volume transaksi SRG menjadi salah satu komitmen kerja Bappebti di tahun 2013. “Untuk itu, kami akan terus mendorong agar instrumen ini dapat lebih banyak dimanfaatkan oleh Kelompok Tani, Gapoktan, Koperasi maupun pedagang sebagai penyimpanan komoditi dan penerbitan Resi Gudang,” katanya.

Singkat cerita, Ismadjaja optimis, implementasi dan optimalisasi SRG akan berjalan sesuai yang diharapkan. Pasalnya, melalui skema SRG, komoditi yang disimpan di gudang akan diterbitkan Resi Gudang-nya untuk dapat dijadikan agunan sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya. Kemudian, pelaku usaha dapat menjaminkan Resi Gudang tersebut untuk memperoleh modal kerja dan kebutuhan pembiayaan.

Sehingga, SRG merupakan salah satu alternatif pembiayaan dan sarana tunda jual yang efektif bagi petani dalam menghadapi panen raya, yang pada saat tersebut biasanya harga cenderung ren-

dah. “Pastinya, SRG akan dapat berjalan dengan optimal karena jelas sekali keuntungan untuk petani dengan skema SRG,” tandas Ismadjaja Toengkagie.

## SRG Rumput Laut

Untuk memberikan fasilitas pembiayaan dan peningkatan efisiensi pemasaran rumput laut, Bappebti akan mengimplementasi SRG komoditas rumput laut di Sulawesi Selatan pada Februari mendatang.

Menurut Ismadjaja Toengkagie, Koperasi Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Kospermino) Makassar yang akan menjadi pengelola gudang SRG rumput laut telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepakatan dengan PT Pertani (Persero) sebagai pendamping Pengelola Gudang.

“Bappebti hanya tinggal menunggu kelengkapan dokumen mereka, dan kalau sudah lengkap, pasti langsung disetujui. Sehingga bulan Februari mendatang, SRG untuk rumput laut sudah mulai berjalan,” ungkap Ismadjaja.

Selama ini, harga jual yang diterima oleh nelayan atau pembudidaya rumput laut cenderung lebih rendah dari harga yang seharusnya. Akibatnya, pendapatan yang diterima oleh pembudidaya rumput laut masih rendah sehingga tingkat kehidupannya dominan kurang baik. Untuk itu, penerapan SRG diharapkan dapat mengangkat harga jual komoditas ini yang terlalu rendah akibat permainan para tengkulak. Tidak hanya itu,

SRG juga dapat memberikan akses permodalan bagi nelayan untuk mengembangkan usaha budidayanya.

Sebagai informasi, rumput laut merupakan salah satu komoditas unggulan di Propinsi Sulawesi Selatan. Pasalnya dari total produksi nasional, sekitar 33,33 % produksi rumput laut dihasilkan dari wilayah ini. Tercatat, produktifitas rumput laut di Sulsel setiap tahunnya bisa mencapai sekitar 1,5 juta ton dengan luas lahan mencapai 500 hektare.

## SRG Garam

Selain SRG rumput laut, Bappebti juga menargetkan SRG untuk komoditi garam akan dapat diimplementasikan pada bulan Februari 2013. “Proses SRG garam hanya tinggal menunggu penetapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) agar garam menjadi salah satu komoditi yang dapat di simpan di gudang SRG. Permendag itu diperkirakan akan terbit sekitar awal Februari,” kata Ismadjaja.

Selanjutnya, terang Ismadjaja, jika permendag sudah terbit maka SRG garam sudah dapat diimplementasikan. Terlebih lagi, PT Garam (Persero) selaku calon pengelola gudang dan petani garam sudah sangat menantikan kehadiran SRG untuk garam.

Pasalnya, PT Garam kekurangan likuiditas untuk membeli garam petani. Di sisi lain, harga garam konsumsi di tingkat petani masih jauh dari harga pembelian pemerintah sebesar Rp 750 perkilogram, yakni berkisar Rp 200 perkilogram. “Kasihani petani menjual garamnya dengan murah sekali, karena mereka tidak punya pilihan, terpaksa mereka harus jual,” ujarnya.

“Nah, dengan SRG, petani garam akan dapat memperoleh bantuan pembiayaan dari perbankan. Selain itu, PT Garam pun tidak akan pusing karena keterbatasan dana untuk membeli garam petani. “Untuk sementara, komoditi yang lebih dahulu masuk dalam skema SRG yaitu garam konsumsi K1 dan K2,” terangnya.

Ismadjaja menambahkan, SRG garam rencananya akan diimplementasikan di tiga kabupaten di Pulau Madura, yakni Kab. Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. “Garam produksi petani nantinya menggunakan gudang milik PT Garam, yang selaku menjadi Pengelola Gudang.” ▲





# Agenda Foto



*Bappebti menyelenggarakan pemaparan kebijakan di bidang perdagangan berjangka komoditi di tahun 2013. Salah satu isu pokok yang mendapat sorotan dipertemuan tersebut yakni meningkatkan volume transaksi kontrak multilateral mencapai 30 %. Hal itu terkait kontrak kinerja Kepala Bappebti terhadap Menteri Perdagangan. Kegiatan ini dihadiri seluruh pengambil keputusan pelaku industri perdagangan berjangka komoditi. **Bandung, 22 Januari 2013.***



*Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, memberi pengarahan dalam sosialisasi peraturan menteri perdagangan tentang ekspor timah. Kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan kementerian perdagangan terhadap bursa komoditi timah sebagai acuan harga ekspor dan sarana memperoleh komoditi timah. **Jakarta, 28 Januari 2013.***



*Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, menandatangani Penyempurnaan Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka, pedoman akuntansi tersebut telah sesuai dengan International Financial Reporting Standar (IFRS). Dalam penyempurnaan pedoman akuntansi tersebut Bappebti bekerjasama dengan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia. **Jakarta, 28 Desember 2013***



## SISWAS-PK Pusat Pengaduan Konsumen

**M**eningkatkan pelayanan publik khususnya para konsumen, Kementerian Perdagangan (Kemendag) secara resmi meluncurkan Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen (SISWAS-PK). Menurut Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, SISWAS-PK merupakan sistem yang dikembangkan untuk melayani pengaduan konsumen secara online. “Sistem ini memiliki jaringan pen-

gaduan di 33 provinsi,” kata Gita Wirjawan saat peluncuran SISWAS-PK di Jakarta.

Pengembangan SISWAS-PK, kata Gita, menjadi akses sarana konsumen menyalurkan pendapat dan keluhannya terhadap barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan pelaku usaha.

Bagaimana dengan teknisnya? Gita mengatakan, sistem tersebut dapat diakses langsung oleh konsumen melalui

jaringan Internet pada alamat <http://siswaspk.kemendag.go.id>.

Lebih lanjut, Gita mengatakan, sebagai suatu sistem, SISWAS-PK terintegrasi secara nasional untuk mencatat pengaduan konsumen, laporan kasus dan keluhan konsumen dari seluruh Indonesia, yang kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis pengaduan dengan menggunakan teknologi informasi secara online. ▲

## SRG Pasbar Beroperasi, Solok dan Tanah Datar Menyusul

**S**istem Resi Gudang (SRG) di Kab. Pasaman Barat (Pasbar), Prov. Sumatera Barat, resmi beroperasi pada Senin 21 Januari 2013 lalu, ditandai terbitnya Resi Gudang sebanyak tiga resi dari komoditi jagung sebanyak 42 ton.

Menurut Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti, Ismadjaja Toengkagie, pembangunan gudang SRG Pasbar merupakan sarana petani untuk menyimpan komoditi jagung. Hal ini, lantaran komoditi jagung merupakan komoditi unggulan dan sudah menjadi tanaman andalan masyarakat.

“Tapi, kalau memang ada komoditi lain yang memang produksinya cukup besar dan komoditinya juga masuk

dalam komoditi SRG, ya tidak ada masalah gudang tersebut dimanfaatkan. Seperti komoditi gabah, kakao atau lainnya,” kata Ismadjaja Toengkagie.

Ismadjaja menuturkan, gudang SRG Pasbar memiliki daya tampung 1.500 ton. Selain itu, volume jagung yang ada di gudang saat ini, sudah ada 42 ton jagung dan jumlah resi yang diterbitkan mencapai 3 resi.

“Saya sangat optimis SRG di Pasbar akan dapat berjalan. Pasalnya, respon Pemda Pasbar sangat bagus dan punya komitmen untuk menjalankannya,” kata Ismadjaja.

Sebab itu Ismadjaja berharap, peresmian gudang SRG Pasbar dapat menjadi motivasi untuk dua gudang SRG di

Prov Sumbar lainnya, yaitu di Kabupaten Solok dan Tanah Datar sehingga dapat cepat beroperasi.

“Untuk gudang SRG di Solok dan Tanah Datar, mudah-mudahan dapat dioperasikan juga pada tahun ini,” jelas Ismadjaja.

Dengan penerapan SRG Pasbar, Ismadjaja mengatakan, mampu bermanfaat bagi para petani dan kelompok tani. Diantaranya, dapat memperkecil fluktuasi harga dan petani mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit dari perbankan, karena resi gudang dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan kredit. ▲

## Bursa Regional Karet Optimis Terbentuk 2013

**G**una menciptakan harga global komoditi karet yang stabil dan berkualitas, International Tripartite Rubber Council (ITRC), yang terdiri dari tiga produsen karet terbesar di dunia yaitu Thailand, Indonesia dan Malaysia akan segera memulai pembahasan mengenai rencana pembentukan bursa karet regional. Dengan kehadiran bursa karet regional, ITRC berharap dapat lebih mengedalikan suplai dan kebutuhan karet dunia. Selain itu, pemantauan atas realisasi ekspor karet dari

setiap negara dapat dilakukan secara transparan.

Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya, menyatakan, optimis pada akhir tahun 2013 bursa karet regional dapat terealisasi. Walaupun sampai saat ini, rencana bursa regional ini masih dalam proses. “Kami mengharapkan akhir tahun ini dapat diimplementasikan.” Rencananya pertemuan ketiga negara tersebut akan berlangsung di Thailand pada Februari 2013.

“Tim teknis akan bertemu di bulan Februari nanti, untuk menyamakan per-

sepsi,” jelas Syagrul.

Lebih jauh di katakana Syahrul, pelaksanaan perdagangan karet secara teknis akan dilakukan oleh negara produsen karet dengan standar mutu masing-masing. Namun implementasinya dilakukan pada waktu yang bersamaan secara online.

“Sejauh ini, dari negara anggota ITRC, Indonesia dan Malaysia yang paling siap melaksanakan kebijakan ini. Kalau Thailand masih mempertimbangkan pasar penjualan fisik,” ungkap Syahrul R Sempurnajaya. ▲



## PT Pegadaian Rambah Bisnis SRG



**B**ank Indonesia menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank. SE bernomor 14/38/DASP tanggal 28 Desember 2012, itu, merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/3/PBI/2012 ten-

tang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank.

Penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank dalam penerapan Program APU dan PPT, wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis. Prosedur itu paling tidak mencakup pelaksanaan “customer due diligence” (CDD) dan “enhanced due diligence” (EDD), yang terdiri dari permintaan informasi dan dokumen, verifikasi dokumen, dan pemantauan transaksi.

Kebijakan dan prosedur tertulis lain mencakup penatausahaan dokumen, penetapan profil pengguna jasa dan pengkinian informasi pengguna jasa, penolakan dan penghentian hubungan usaha, kebijakan dan prosedur transfer dana, dan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dalam hal penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank berhubungan dengan pengguna jasa yang tergolong berisiko tinggi terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme, penyelenggara tersebut wajib melakukan prosedur CDD yang lebih mendalam yang disebut dengan “enhanced due diligence” (EDD).

Penyelenggara wajib menatausahakan dokumen dengan baik sebagai upaya untuk membantu pihak yang berwenang dalam melakukan penelusuran terhadap dana-dana yang diindikasikan berasal dari hasil tindak pidana.

Penyelenggara wajib memiliki fungsi pengendalian internal yang efektif yang dilakukan dengan penetapan kebijakan direksi, yang dapat memastikan bahwa pelaksanaan Program APU dan PPT telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. ▲

## Konmin Meredam Broker Ilegal



**L**egalnya layanan *mini account* atau kontrak mini di Indonesia, menurut Kepala Bappebti, Syahrul R. Sampurnajaya, memiliki dua tujuan penting. Pertama, kontrak mini tersebut menggunakan sistem elektronik on-line. Sehingga, dalam melakukan transaksi kontrak mini tersebut tidak membutuhkan lagi perantara tenaga marketing.

“Artinya, investor yang melakukan proses sell-buy. Sebab itu investornya pun harus sudah mendalami kontrak

yang ditawarkan,” katanya.

Karena tidak membutuhkan tenaga marketing, maka transaksi dilakukan dengan online. Dengan demikian lebih efektif dan transparan, sedangkan dengan marketing menyebabkan banyaknya penipuan, jelas Syahrul.

Kedua, *mini account* dapat menjadi infrastruktur yang aman dan legal untuk para investor. “Selama ini broker asing yang tidak memiliki izin dan tidak jelas legalitasnya banyak diminati oleh masyarakat, pada hal kalau ada masalah

tidak ada yang bisa bertanggungjawab. Oleh karena itu, kita buat infrastruktur yang sama di dalam negeri,” terang Syahrul.

Saat ini, tambah Syahrul, layanan kontrak mini masih dalam tahap percobaan- pilot proyek selama 6 bulan hingga satu tahun ke depan. “Kalau nanti perusahaan pialang yang menawarkan itu tidak mampu menjaga integritasnya, akan kita evaluasi. Bila perlu izin kontrak mini- nya kita cabut.”

“Sebenarnya kontrak mini pernah diterapkan, tapi memang tidak dengan sistem online, jadi modelnya seperti togel. Nah, saat itu Bappebti pernah menarik kembali ijin akun mini atau lot kecil tersebut,” katanya.

Jadi, kata Syahrul, skema Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) terhadap kontrak-kontrak dengan lot size yang kecil (kontrak mini) yang saat ini diluncurkan berbeda dengan layanan terdahulu. “Perbedaannya terletak pada sistem elektronik on-line nya. Dan, kontrak mini ini tidak mengganggu kontrak multilateral,” tegas Syahrul R. Sampurnajaya. ▲

## Petani Rumput Laut Nantikan Industri Hilir

**A**sosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) berupaya membina para petani untuk menghasilkan rumput laut berkualitas tinggi sehingga memiliki daya saing di pasar luar negeri. Ketua ARLI, Safari Azis, mengatakan, rumput laut saat ini sudah merupakan komoditi yang memiliki pasar luas di mancanegara. Karena itu harga akan tergantung dengan supply and demand. “Kami sangat berkeinginan para petani rumput laut bisa menghasilkan kualitas ekspor. Saat ini harga di luar negeri berkisar Rp 10.000 per kg.”

“Harga di luar negeri tidak pernah statis, tetapi naik turun. Karena itu, petani pun harus dibina sehingga tidak melulu mengetahui cara bertani tetapi juga cara berbisnis rumput laut yang benar,” kata Safari.

Sebab, tambahnya, ada petani yang hanya konsentrasi memproduksi saja dan menjual dengan harga berapa saja pun mau. “Jadi prinsip penyuluhan akan bisa mengubah perilaku petani, terutama untuk pengembangan bisnis dan usaha rumput laut.”

“Di sisi lain, ARLI juga berusaha meyakinkan pemerintah untuk tidak menerbitkan berbagai peraturan yang tidak berpihak kepada industri dalam negeri dan petani. Karena kalau ada pembatasan atau pelarangan ekspor, petani tidak bisa jual kepada pengumpul eksportir. Hasil panen menumpuk, mau dikemanakan? Sebab itu kita minta kepada pemerintah untuk mendorong industri pengolahan rumput laut di dalam negeri, sehingga pasar petani terbuka luas,” jelas Safari.

Namun diakui Safari, program hiliri-

sasi rumput laut masih terbentur dengan minimnya konsumsi dalam negeri. Selain itu, teknologi pengolahan rumput laut belum maksimal untuk industri dalam negeri. Sebagai perbandingan, China sudah berhasil mengolah rumput laut menjadi karagenan. “Kita masih perlu menyusun blue print untuk program pengembangan rumput laut nasional,” imbuh Safari Azis. ▲



## KKP Optimis 2013 Over Produksi Garam Industri

**K**ementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan terus menggenjot produksi garam industri hingga bisa mencapai target 1,8 juta ton pada tahun 2013. Ada tiga hal yang sangat signifikan sebagai penentu pencapaian produksi, yaitu cuaca, teknologi, dan lahan pertanian garam. Tahun 2012 lalu, secara umum cuaca sangat mendukung untuk produksi garam. Sehingga produksi garam rakyat mendekati target yang dicanangkan.

“Tahun lalu, produksinya sekitar 1,5

juta ton. Kita terus memikirkan, supaya ada penyerapan garam rakyat untuk industri,” Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha KKP, Ansori Zawawi.

Menurut Ansori, metode dan teknologi sebetulnya bukan sesuatu yang sulit. Tetapi kalau hal tersebut tidak didukung oleh lahan pertanian yang cukup, target sulit tercapai. Selama ini, petani menjemur garam-garam selama 3 – 4 hari. Setelah itu, petani langsung mengangkat garam-garamnya. “Kami ingin agar peng-

garaman di bawah terik matahari lebih lama, yaitu sekitar 15 hari. Bahkan untuk penggaraman selama satu bulan, hasilnya lebih baik untuk garam industri.”

Namun Ansori, produksi garam bisa meningkat dengan ekstensifikasi lahan garam di beberapa daerah serta petani menggunakan metode meningkatkan kadar NaCl (natrium chloride) sampai 97 %.

“Selama 30 tahun, kita belum pernah ekspor garam. Tapi mulai tahun ini, kita sudah over production, berarti bisa ekspor,” kata Ansori Zawawi. ▲

## BK Genjot Hilirisasi CPO



**I**ndonesia enggan mengikuti langkah pemerintah Malaysia dalam penurunan bea ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) sebesar 0 % mulai Februari 2013. Sementara, bea ekspor CPO Indonesia masih 7 %. Bea masuk yang lebih tinggi itu membuat sawit Indonesia menjadi lebih mahal harganya ketimbang Malaysia. Kondisi ini tentu saja akan membuat pembeli mencari harga sawit yang lebih murah.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kemendag, Bachrul Chairi, mengakui hingga kini Indonesia masih mengenakan

bea ekspor CPO lebih besar dibandingkan Malaysia. “Pemerintah Indonesia belum menurunkan bea keluar CPO meski Malaysia sudah menurunkannya,” ujar Bachrul Chairi.

Dia menyatakan alasan Indonesia masih mengenakan bea keluar karena pemerintah ingin membangun industri hilir CPO. Selama ini Indonesia lebih banyak mengekspor CPO mentah ketimbang memprosesnya terlebih dulu di dalam negeri. Pada Januari 2013 ini, Indonesia masih mengenakan bea keluar CPO sebesar 7,5 %. ▲



## The Trading Ministry has set ICDE as tin exporter's referral

**T**rading Ministry has set Indonesian Commodity and Derivative Exchange as the reference of domestic tin export price. The setting of ICDE is stated on Trading Ministry Policy No. 78/M-Dag/Per/12/2012 in regards tin export policy. The policy was published on the 14th of December 2012 and the effective application on the 1st of January 2013.

According to that policy, stated on clause 1 paragraph 15 : Tin Exchange is International Tin market that is part of Indonesian Commodity and Derivative

Exchange.

Moreover it is stated on that regulation that the calculation on production contribution or royalty is based on average price at ICDE and International Tin Exchange. This point is stated on Clause 12 Paragraph 1 ; The average price of tin on tin exchange and/or average price of tin at international tin exchange by the time of exporting can be used as base calculation of production contribution or royalty.

While on Paragraph 1 stated; when there is a significant difference between average price of tin on tin exchange with

average price of tin on international tin exchange as mentioned on paragraph (1), the tin price establishment will be based on the highest average from those 2 (two) tin price source.

As notes, ICDE traded tin commodity on the 15th of December 2011. At that time tin price at global market has dropped to the lowest position. The operation of tin trading at ICDE is supported by PT Timah (PTY) and Indonesian Tin Association. ▲

## FBAG regulates Futures Brokers

**F**utures Broker Accountancy Guidance (FBAG) is an important factor that needs to be considered by futures broker as guidance to make accurate, transparent and structured financial report as per Monetary Accountancy Standard (MAS)

In regards to this, Coftra as the highest authority of local futures trading has completed FBAG that has officially established at the Establishment and Implementation of FBAG completion event on Friday 14th of December 2012 at Orchardz Hotel, Jakarta.

"With the completion of FBAG and the establishment of decree today, there-

fore futures brokers obligates to set the monetary report base on the completed FBAG," Coftra chief Syahrul R. Sempurnajaya emphasized.

FBAG that has been completed to fit that Monetary Accountancy Standard (MAS) is based on the convergence of International Financial Reporting Standard (IFRS), Syahrul added.

The completion of FBAG is a work result between Coftra and Indonesian Accountant League (IAL), futures exchange and futures clearing institute for more or less 2 months.

According to Syahrul, the use of FBAG that has been adapted with MAS will be an

international monetary report standard. Therefore, futures broker can met one of the requirements for a company to go public or to be able to do public offering.

It is an activity that is done by a company to collect fund from public investor by selling share and debenture. "Another advantage is that futures broker can be a listed company in capital market."

"With the completion of FBAG, it is expected that market investors activity can be more developed and can increase national economy and also can give advantages for all aspects in the future," Syahrul R. Sempurnajaya said. ▲

## WRS is important for Cocoa downstream industry

**R**eferred to the rapid growth of National cacao downstream industry in the last two years, therefore WRS is hoped to be an active instrument for cocoa commodity. Aside the use to guarantee industry needs as per standard, it is also increase the farmer performance for cocoa product. Therefore, if the farmer can nto increase the product, it is predicted that in 2014 Indonesian Cocoa downstream industry will import the cocoa bean.

It is one of the topic that was said by Indonesian Cocoa Industry Association Chief, Piter Jasman to Buletin Kontrak Berjangka recently in one occasion.

"We can see that since government policy implemented export charge for

Cocoa BK, foreign cocoa industry has entered Indonesian market. Therefore, cocoa should be one of the commodities that included on WRS. Besides that we also need physical auction market for cocoa so it can shorten domestic cocoa marketing," Piter Jasman explained.

We will support every government's program, Piter added. "If needed, government can require all investors to get cocoa bean from auction market transaction and WRS."

"Before the Cocoa BK, 70% of cocoa bean was exported. But with the BK policy the opposite thing happened, 70% of cocoa bean is treated locally. Therefore this policy is quite good for the development of domestic cocoa industry. And with the

existence of BK it can grow cocoa plant inside the country," Piter explained.

Moreover Piter said that Cocoa SNI needs to be implemented. Until today Indonesia is the only cocoa producer around the world that has not established cocoa SNI.

"Therefore we are from AIKI association always suggests all farmers to do longer cocoa fermentation. Wait until the time is good to sell it. Usually fermentation period is 5 to 6 days, but because the farmer needs money they only fermented for 3 days. It can make the fermented cocoa price low and the quality is not too good," said the founder of Bumi Tangerang Cocoa Pty Ltd. ▲



## PEMBIAYAAN RESI GUDANG BULAN JANUARI 2013

NO	PENGELOLA GUDANG / GUDANG	Komoditi	Resi Gudang Terbit	Nilai Barang (Rp)	RG Diagunkan	Nilai Pembiayaan (Rp)	Bank/LKNB
1	PT. PERTANI						
	- Gudang Pasaman Barat	Jagung	3	144.455.800	3	101.037.000	BRI
	- Gudang Jepara	Gabah	1	41.340.000	1	28.000.000	Bank JATENG
2	PT BHANDA GHARA REKSA						
	- Gunung Lintong - Deli Serdang	Kopi	1	645.000.000	-	-	-
		Gabah	1	41.340.000	1	28.000.000	
		Jagung	3	144.455.800	3	101.037.000	
		Kopi	1	645.000.000	-	-	
	<b>JUMLAH</b>						
			5	830.795.800	4	129.037.000	
	<b>TOTAL</b>						



**P**ada bulan Januari 2013, terdapat 4 resi yang diberikan pembiayaan oleh Bank BRI cabang Pasaman Barat dan Bank Jateng cabang Jepara dengan total nilai pembiayaan yang diberikan sebesar Rp. 129.037.000. Sedangkan 1 resi yang diterbitkan di Kab. Deli Serdang belum dimanfaatkan pemiliknya (PT Gunung Lintong) untuk memperoleh pembiayaan karena Kab. Deli Serdang baru saja mengimplementasikan Resi Gudang pada Januari 2013, sehingga lembaga perbankan yang ada di Sumatera Utara masih dalam penyiapan implementasi Sistem Informasi Resi Gudang (IS-WARE). Direncanakan pada awal Februari 2013 pembiayaan sudah dapat dilakukan.

Seperti tampak pada Tabel Pembiayaan Resi Gudang Bulan Januari 2013, pada bulan Januari total pembiayaan yang

diberikan oleh lembaga keuangan (Bank BRI dan Bank Jateng) adalah sebesar Rp. 129.037.000 yang diberikan melalui Skema Subsidi Resi Gudang kepada Kelompok Tani, Gapoktan dan Koperasi.

Resi Gudang dalam SRG memiliki masa aktif rata-rata kurang lebih 4 bulan. Oleh karena itu, dengan adanya penerbitan Resi Gudang pada masa akhir tahun 2012 di daerah Indramayu, Banyuwangi, Sidrap, Pinrang, Mojokerto, Jombang, Cianjur, Ngawi, Sumedang, Ciamis, Lombok Barat, Tuban, Barito Kuala maka pada periode Januari 2013 masih terdapat 108 resi gudang aktif (barang masih disimpan di gudang SRG) untuk komoditi Gabah, Beras, Jagung dan Kopi dengan total volume sebesar 4.128,3 ton. ▲



**KETERSEDIAAN STOK KOMODITI DALAM GUDANG SRG  
BULAN JANUARI 2013**

NO	DAERAH / GUDANG	VOLUME KOMODITI (TON)			
		GABAH	BERAS	JAGUNG	KOPI
1	<b>Kab. Indramayu</b>				
	- Haurgeulis (Pertani)	535,6			
	- Losarang (Pemkab)	115			
2	<b>Kab. Banyuwangi</b>				
	- Muncar (Pertani)	104			
3	<b>Kab. Sidrap</b>				
	- Sereang (Pertani)	112,98	237,75		
4	<b>Kab. Pinrang</b>				
	- Watang Sawito (Pertani)	372,33			
5	<b>Kab. Mojokerto</b>				
	- Ngoro (Pertani)	336			
6	<b>Kab. Jepara</b>				
	- Pecangaan (Pemkab)	7,95			
7	<b>Kab. Jombang</b>				
	- Mojoagung (Pertani)	445			
8	<b>Kab. Cianjur</b>				
	- Warungkondang (Pemkab)	700,25			
9	<b>Kab. Sumedang</b>				
	- Tomo (Pemkab)	25			
10	<b>Kab. Ciamis</b>				
	- Cisolontrol (Pertani)	120			
11	<b>Kab. Lombok Barat</b>				
	- Kediri (Pertani)	405,2			
12	<b>Kab. Lebak</b>				
	- Cibadak (Pemkab)	120			
13	<b>Kab. Pasaman Barat</b>				
	- Pasaman (Pemkab)			42,49	
14	<b>Kab. Barito Kuala</b>				
	- Mandastana (Pemkab)	405,77			
15	<b>Kab. Deli Serdang</b>				
	- Tanjung Morawa (Gunung Lintong)				15
<b>TOTAL</b>		<b>3.833,08</b>	<b>237,75</b>	<b>42,49</b>	<b>15</b>



Mendag, Gita Wirjawan, didampingi Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya, Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Erik Satrya Wardhana, saat mengunjungi Gudang SRG Warungkondang. 6 Juli 2012.

## Denyut SRG Cianjur

*Gudang SRG Warungkondang memosisikan dirinya sebagai cadangan pangan di Kabupaten Cianjur*



Kepala Bidang Perdagangan dan Perindustrian Cianjur, Judi Adi Nugroho

**G**udang Warungkondang merupakan satu-satunya gudang di kabupaten Cianjur yang menggunakan skema sistem resi gudang (SRG). Secara geografis, letaknya sangat strategis karena berada di pusat pertanian kabupaten yang menjadi sentra penghasil beras pandan wangi ini.

Gudang SRG ini di bangun pada tahun 2009. Kemudian, penerapan skema SRG mulai dilakukan pada tahun 2011. Untuk diingat, Gudang Warungkondang telah menyabet SRG Award pada September 2012 lalu. Penghargaan yang diberikan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan ini, menunjukkan sistem pengelolaan SRG Cianjur dapat berjalan baik dan kinerjanya patut diberikan apresiasi.

Menurut Kepala Bidang Perdagangan dan Perindustrian Cianjur, Judi Adi Nugroho, hal tersebut tidak lepas dari kerja keras Pemkab Cianjur yang terus

membenahi dan mensosialisasikan SRG kepada Masyarakat. Sosialisasi SRG itu dilakukan secara periodik dan persuasif kepada petani, kelompok tani ataupun gabungan kelompok tani.

“Dengan demikian, penerapan SRG di Gudang Warungkondang diharapkan dapat menjadi gudang cadangan pangan di Kabupaten Cianjur selain Depot Logistik (Dolog),” kata Judi Adi Nugroho kepada **Buletin Kontrak Berjangka**, Januari lalu.

Selain itu, kata Judi, upaya sosialisasi rupanya cukup berbuah hasil. Pasalnya, keberadaan SRG Cianjur sebagai salah satu instrumen pembiayaan melalui mekanisme tunda jual semakin menarik minat masyarakat setempat. “Saat ini, sudah ada 4 gapoktan yang berperan aktif dalam SRG. Dan volume transaksi SRG kian meningkat.”

Bahkan, lanjut Judi, Gudang Warungkondang selalu penuh dengan tumpukan karung gabah milik petani yang menyimpan hasil panennya. “Gencarnya sosialisasi membuat masyarakat justru



berlomba untuk menyimpan hasil pertaniannya. Hal tersebut, membuat gudang ini tidak dapat lagi menyimpan gabah petani lainnya.”

Hal itu, kata Judi, membuat gudang Warungkondang menjadi over kapasitas. Sehingga, banyak petani yang harus masuk daftar tunggu untuk menyimpan komoditinya. “Ini menjadi salah satu kendala, kami butuh gudang lainnya untuk menampung gabah petani.”

Selain itu, menurut Judi, permasalahan yang dihadapi Gudang Warungkondang, yaitu, kekurangan unit pengering gabah atau mesin dryer pengering gabah yang kini hanya ada satu unit. Lainnya, pihak pengelola SRG di Cianjur ini juga tidak memiliki alat transportasi atau angkutan sebagai sarana pengangkutan gabah petani ke Gudang Warungkondang.

Ke depan, kata Judi, untuk optimalisasi SRG di Cianjur, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Cianjur akan memberikan kepercayaan penuh kepada koperasi sebagai pengelola gudang. “Sampai saat ini, koperasi masih menjadi calon pengelola gudang. Maka itu kami berharap harus ada target waktu dari Bappebti agar koperasi calon pengelola menjadi pengelola gudang,” ungkap Judi.

## SRG Tingkatkan Produksi Pandan Wangi

Ingat beras Pandan Wangi, ingat pula Cianjur. Hal itu mungkin menjadi ungkapan tepat untuk Cianjur yang menjadi sentra produksi beras pandan wangi. Masih segar diingatan, Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan saat



melakukan kunjungan kerja ke Cianjur, Juli tahun lalu, mengungkapkan, beras Pandan Wangi dikenal sebagai produk unggulan khas Cianjur sekaligus produk kebanggaan nasional.

Nah, saat itu, Gita mengatakan, peranan SRG menjadi salah satu instrumen penting dan bermanfaat bagi petani Cianjur untuk meningkatkan produksi beras Pandan Wangi. “SRG bermanfaat bagi petani sebagai upaya mendapatkan harga terbaik dengan menahan penjualan produk pada saat musim panen raya karena harga yang cenderung rendah,” kata Gita saat berkunjung ke gudang SRG Warungkondang.

Dengan demikian, lanjut Gita, lambat laun petani tidak hanya sebagai petani produsen, tetapi petani bisnis yang

dapat memprediksi kapan harus menahan atau menjual hasil produksinya dengan harga terbaik dan keuntungan yang optimal.

“Sebagai gudang SRG, keberadaan gudang Warungkondang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah. Implementasi tersebut merupakan jalinan kerjasama secara sinergis antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak terkait lainnya,” ujar Gita Wirjawan. ▲



## Analisa SRG Cianjur

- Perlunya penambahan gudang di Kabupaten Cianjur
- Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui sistem resi gudang.
- Resi gudang merupakan alternatif pembiayaan.
- Resi gudang merupakan instrumen keuangan dan alat pemasaran bagi petani maupun pelaku usaha .
- Perlunya koordinasi dan sinergitas yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, petani, poktan, gapoktan, koperasi, pelaku usaha pengelola gudang, badan ketahanan pangan, pengelola gudang dan lembaga keuangan/ perbankan.
- Perlu ketersediaan anggaran biaya operasional pengelolaan, perawatan dan angkutan gudang.
- Harus ada target waktu dari bappebti untuk koperasi calon pengelola menjadi pengelola gudang.



## Demokratisasi Pasar Berujung Inovasi & Pertumbuhan

*Pentingnya perlindungan konsumen, transparansi, kompetisi dan integrasi pasar bentuk inovasi serta perkembangan pasar berjangka.*

**\*) Subagyo  
Kasubag Humas  
& Kerjasama Bappebti**

*Catatan; hasil seminar 28th Annual Futures & Option Expo, di Chicago, Amerika Serikat pada 28 Oktober - 02 November 2012*

Bencana alam sandy north-stroms- yang melanda pantai timur Amerika Serikat beberapa waktu lalu, memberi gambaran kepada kita betapa pentingnya penanggulangan bencana yang lebih cepat. Serta, kita pun harus berpikir kembali menghadapi bencana yang bakal menyusul di masa mendatang. Badai yang melanda pantai timur Amerika Serikat itu, juga mengingatkan kita terhadap krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008 lalu. Sebab itu kita harus memilih cara-cara yang tepat dan cepat untuk memberi perlindungan kepada investor.

Berkaitan dengan itu, guna memberi perlindungan kepada investor perlunya kita mengambil langkah-langkah yang tepat yakni kembali ke teori dasar. Bahwa peran pasar keuangan adalah untuk mengalokasikan harga seluruh investasi dan risiko atas perekonomian kita. Maka, kita pun perlu membuka akses pasar dan informasi, dan penetapan harga secara transparan yang bebas dari penipuan dan manipulasi.

Demikian antara lain diutarakan Chairman of The US Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Garry Gensler, dalam pembukaan Seminar 28th Annual Futures & Option Expo, di Chicago, Amerika Serikat pada 28 Oktober - 02 November 2012, lalu. Dalam kesempatan itu, Bappebti diwakili Penulis dan KaBag. Pelanggaran Transaksi, Bappebti, Mualim Syuaib.

Lebih jauh dijabarkan Garry Gensler, meskipun kegiatan pasar dan regu-

lasi terus berkembang seiring dengan waktu dan tujuan pertemuan perdagangan berjangka dalam beberapa dekade, akan tetapi pada tahun 2008 sistem keuangan telah gagal dalam mengendalikan kondisi krisis keuangan, mengingat pasar swap yang pada dasarnya tidak diatur telah gagal memenuhi tujuan tersebut.

Sebab itu, perlu perlu dipikirkan revitalisasi pasar yang didasarkan pada aspek-aspek transparansi, kompetisi, dan integritas pasar untuk pasar berjangka dan pasar keuangan. Demokrasi pasar yang dilaksanakan selama ini telah menyebabkan terjadinya inovasi dan pertumbuhan di pasar keuangan.

Dari catatan Penulis, seminar itu juga menggambarkan era perubahan besar dalam rangka dimulainya reformasi terhadap pasar swap. Hal ini agar memberi manfaat yang signifikan bagi masyarakat, dan menjadikan peluang serta tantangan bagi peserta pasar berjangka dalam rangka memberi perlindungan kepada nasabah.

Sebab itu, ada tiga kata kunci yang harus dipertimbangkan yang bisa dilakukan oleh Badan Pengawas dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut di pasar swap. Yakni, kebutuhan akan pentingnya lembaga kliring, reformasi transparansi dan aplikasi teknologi lintas batas. Selain itu, hal penting lainnya yang perlu dipertimbangkan sebagai masukan dari masyarakat adalah peningkatan perlindungan nasabah dan standar acuan dalam penentuan suku bunga.



*revitalisasi pasar yang didasarkan pada aspek-aspek transparansi, kompetisi, dan integritas pasar untuk pasar berjangka dan pasar keuangan*



Topik hangat lainnya yang diangkat pada pertemuan tahunan itu yakni, Moving Toward a New Customer Protection Regime- perubahan rezim perlindungan nasabah. Dengan pembicara Tim Doar (Managing Director & Chief Risk Officer, CME Group), Diana Klemme (Vice President, Grain Service Corporation), Dan Roth (President & Chief Executive Officer, National Futures Association) dan Dale Spoljaric (Vice President, Barclays Capital).

Isu pokok yang dibicarakan yakni usulan dan inisiatif dari berbagai pihak untuk membahas regulasi terkait perlindungan konsumen. Hal itu mengacu pada fenomena kebangkrutan MF Global dan Peregrine, yang membuat pelaku industri, legislator, regulator dan kelompok pelanggan mencari berbagai cara untuk meningkatkan perlindungan dana nasabah.

Di sesi lain, topik yang diangkat adalah Will Swaps Become More Futurized?. Sebagai sistem swap yang berhubungan dengan persyaratan Dodd-Frank yang mulai berlaku, beberapa pelaku pasar sedang mempertimbangkan apakah akan lebih efisien untuk perdagangan berjangka digantikan dengan sistem swap. Pendekatan seperti memiliki keuntungan dari keakraban operasional yang lebih besar, persyaratan margin yang lebih rendah, dan ketidakpastian regulasi berkurang.

Tapi hal itu masih jauh dari pasti bahwa “swap futurized” sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan pengguna akhir lindung nilai, kini belum ada kejelasan bahwa produk ini akan memiliki dukungan yang cukup dari dealer swap yang menyediakan sebagian besar likuiditas di over-the-counter pasar saat ini. Panel ini memeriksa tren yang ada

menuju “futurization” swap di sektor energi, kemudian mempertimbangkan pro dan kontra dari suatu tren di kelas aset lainnya.

Topik basahan lainnya, “Clearing Member Risk Management.” Pada sesi ini menghadirkan beberapa pembicara diantaranya William Cleary (Managing Director, Bank of America Merrill Lynch), Keith McMahon (Director, Risk Management-Americas, Newedge) dan Greg Wood (Director, Algorithmic Execution, Listed Derivatives and Foreign Exchange, Deutsche Bank Securities).

Sesi ini membahas bahwa CFTC mengabulkan perpanjangan delapan bulan bagi industri berjangka untuk menerapkan pengendalian risiko. Panel itu juga membahas bagaimana industri berencana untuk mengatasi aturan baru yang mengharuskan kliring FCMs untuk menempatkan batas pada kontrol risiko untuk manajer aset.

### **Kesimpulan**

Pada dasarnya Seminar Futures and Option Expo 2012, yang diselenggarakan oleh Futures Industry Association (FIA) tersebut memberikan manfaat yang sangat besar bagi perkembangan industri perdagangan berjangka saat ini. Terutama berkaitan dengan transaksi derivative dan swap. Dalam seminar tersebut selain membahas topik-topik penting terkait dengan kegiatan perdagangan berjangka, juga dihadiri para exhibitor yang memasang gerai/booth pameran sebanyak 145 peserta baik Bursa, Pialang, Penyedia System dan pihak sponsor lainnya yang berasal dari seluruh dunia menghadiri event internasional ini.

Dalam Panel ahli clearinghouse membahas pelaksanaan kliring OTC, in-

dustri kesiapan untuk LSOC, menyeimbangkan tuntutan yang bertentangan dari sisi pembelian dan anggota kliring, dan produk yang berniat untuk mendaftar di kliring. Penjelasan yang mencakup standarisasi sistem dan proses pemilihan tempat transaksi, dampak aturan perlindungan terhadap pelanggan atau pelaku baru dalam memberikan integritas keuangan, dan tantangan paling signifikan adalah bagaimana permasalahan yang mulai bermunculan yang harus segera ditangani, mengingat saat ini sumbangan krisis yang terjadi selama ini akibat kurangnya pengawasan terhadap transaksi yang terjadi di Over The Counter (OTC).

Hal-hal lain yang dibicarakan dalam seminar adalah mengenai usulan dan inisiatif dari berbagai pihak untuk membahas regulasi terkait perlindungan konsumen, “Moving Toward a New Customer Protection Regime”. Sejak kebangkrutan MF Global, kalangan industri, legislator, regulator dan kelompok pelanggan telah mencari berbagai cara untuk meningkatkan perlindungan dana nasabah dalam penyelenggaraan perdagangan berjangka dan swap. Untuk itu pada bulan November 2012 US Futures Commission Merchants and swaps clearinghouses mulai memperkenalkan bentuk perlindungan nasabah yang disebut dengan traditional futures segregated model, atau yang lebih dikenal dengan nama Legally Segregated Operational Commingled (LSOC). LSOC adalah bentuk perlindungan yang diberlakukan oleh US Futures Commission dibawah ketentuan reformasi Dodd-Franks US LSOC dan hanya berlaku dibawah otoritas Amerika Serikat.





Erwin Noviansyah

## Pemimpin Besar 'Lahir di Lapangan'

**T**idak mudah membuat janji untuk bertemu dengan tokoh kita yang satu ini. Dua kali disusun schedule untuk mewawancarainya, terpaksa batal karena ada pertemuan mendadak yang harus dihadiri. Maklum, posisinya cukup penting mewakili perusahaan yang dikomandoinya. Tetapi pada schedule yang ketiga, Redaksi Buletin Kontrak Berjangka diterima Erwin Noviansyah, Direktur Utama PT ASKAP Futures di ruang kerjanya di bilangan Senayan, Jakarta Selatan.

Pukul 08.05 WIB, Redaksi sudah ada di depan reception ASKAP, suasana kantor perusahaan pialang ini masih terlihat sepi. Tetapi sekitar tiga menit menunggu, Redaksi pun dipersilahkan memasuki ruangan dan menemui Erwin.

"Maaf, janji kita harus diundur dua kali. Dan hari ini pun, kita ketemu lebih pagi," kata Erwin singkat sambil menjulurkan tangan untuk berjabat.

"Memang biasanya datang ke kantor

lebih pagi pak?" tanya Redaksi. "Kalau tidak ada kegiatan di luar kantor, sebelum jam delapan pagi saya sudah ada di kantor," tangkis Erwin.

Tidak mau membuang waktu mengingat kesibukan Erwin, Redaksi pun langsung melontarkan pertanyaan. Apa yang melatarbelakangi ASKAP menawarkan kontrak mini? Dijelaskan Erwin, "ASKAP adalah salah satu perusahaan pialang yang dulu pernah menawarkan kontrak mini. Saat itu cukup berhasil, karena itu ASKAP pernah di cap pialang spesialis kontrak mini."

"Itu cerita dulu. Tetapi kemudian regulator menarik kebijakan kontrak mini, karena berbagai alasan. Dan hal itu kewenangan Bappebti," katanya.

Memang tidak ada hubungannya yang jaman dulu dengan kontrak mini saat ini, tambah Erwin. Sebab, regulasinya berbeda. Di samping itu, tujuan dikeluarkannya kebijakan kontrak mini yang sekarang cukup jelas. Yakni, meredam maraknya broker ilegal baik

dari dalam negeri maupun asing yang menawarkan produk-produk keuangan. Karena mereka menawarkan lewat media online, maka kontrak mini pun harus ditawarkan lewat online.

"Hal itu dilakukan untuk mengurangi interaksi langsung antara perusahaan pialang dengan investor. Jadi, investor mendaftar sebagai klien juga dilakukan dengan online," jelas pria kelahiran Jakarta, 1975 ini.

Maka tantangannya bagi perusahaan pialang adalah mengedukasi masyarakat tentang produk-produk kontrak mini. Dan, sosialisasinya pun harus kencang, kata Erwin. "Sebab itu saya mengusulkan kepada bursa dan kliring, termasuk Bappebti, untuk secara bersama-sama melakukan sosialisasi kontrak mini. Kalau bagian sosialisasi ini dibebankan kepada perusahaan pialang, rasanya cukup berat. Apa lagi untuk menjangkau masyarakat ke seluruh tanah air."

"Kalau untuk mengedukasi masyarakat tentang kontrak mini,



kami sudah siapkan beberapa strategi. Misalnya, di website ASKAP, kami siapkan video dan TV streaming yang menyajikan materi-materi kontrak mini. Sehingga masyarakat tidak mesti ke kantor ASKAP untuk memperoleh informasi,” papar Erwin, sambil mengarahkan telunjuknya menunjukan studio yang akan digunakan sebagai studio ASKAP TV. “Di ruangan itu nantinya semua kegiatan video atau TV streaming direkam.”

Untuk bagian edukasi perdagangan berjangka itu, ASKAP menggandeng kalangan akademisi baik dalam menyusun modul maupun tenaga pengajar. “Kami harapkan juga dari kalangan akademisi muncul investor-investor kontrak mini.”

“Dari pengamatan kami, broker ilegal yang menawarkan produk-produk keuangan lewat media online, sasarannya adalah kalangan anak muda atau mahasiswa. Bisa dimaklumi, karena dikalangan usia itulah yang umumnya mengakses media online. Dan saya secara tegas mengatakan, segmen mahasiswa adalah sasaran ASKAP untuk kontrak mini.”

“Ada beberapa alasan mengapa memilih segmen mahasiswa. Pertama, mereka yang lebih familier dengan media online. Kedua, ini adalah bagian investasi jangka panjang yang memperkenalkan industri perdagangan berjangka komoditi,” kata Erwin diplomatis.

“Karena itu saya juga sangat berharap program ini berhasil. Sebab jika berhasil, lambat laun bisa kita arahkan mereka untuk kontrak-kontrak multilateral. Tetapi tentunya bursa juga menyediakan kontrak mini multilateral.”

“Kalau kontrak multilateral bisa dijustifikasikannya menjadi kontrak mini,

saya yakin target transaksi multilateral sebesar 30 % bisa dicapai dalam waktu singkat,” tegas Erwin.

Maka dari itu, kata Erwin lebih jauh, kita berharap Satgas Waspada Investasi dan Kemenkoinfo bisa lebih menggigit dalam menindak broker-broker asing yang menawarkan produknya lewat media online.

Namun menurut Erwin, “bagi kami di ASKAP, kontrak mini sifatnya masih penajakan. Sebab masih banyak yang harus dibenahi. Karena itu kontribusi pendapatan dari kontrak mini bagi perusahaan belum bisa ditargetkan. Malah saya pikir, kami akan banyak habis biaya di bidang edukasinya. Tidak apa-apa, itu adalah bagian dari investasi dan kontribusi perusahaan terhadap masyarakat. Karena saya yakin, kelak akan ada hasilnya.”

Berbicara dari sisi pribadi Erwin Noviansyah, ayah dari empat anak ini sedikit malu-malu. Namun pada akhirnya terbuka juga.

“Sejujurnya saya tidak malu. Malah saya bangga. Sebab, latar belakang pendidikan dan karier saya tidak ada berhubungan dengan industri ini,” kata Erwin bersemangat.

Bayangkan, saya tamat dari STM 6, Kramat Raya, Jakarta Pusat. Setelah tamat, karena sulit mencari kerja dua tahun saya menganggur. Tetapi kemudian bekerja di salah satu perusahaan otomotif sebagai sales. “Jadi saya ini banyak belajar dan besar di lapangan. Menghadapi banyak tantangan dan berbagai latar belakang orang.”

“Bapak saya asli Betawi, dari Tanah Abang. Maka rumah orang tua kami di Tanah Abang. Sedangkan ibu saya dari Bengkulu. Jadi saya ini keturunan betalu-Betawi-Bengkulu,” selorohnya.

“Sambil bekerja di perusahaan

otomotif itu, saya kuliah di salah satu akademi management hingga memperoleh ijazah D3 pada tahun 2000,” kisah Erwin.

Selama 10 tahun saya bekerja di perusahaan otomotif itu, saya melamar dan diterima di salah satu bank nasional. “Dari bank inilah saya mengenal industri perdagangan berjangka komoditi.”

Tahun 2004, saya bergabung di salah satu perusahaan pialang berjangka. “Selama berkecimpung di industri ini, kenal lah saya dengan salah satu pemegang saham ASKAP. Kemudian saya ditarik dan di suruh menangani beberapa bisnisnya. Tetapi saya tetap ada di industri ini, untuk belajar dan memperdalam pengetahuan.”

Tahun 2011, lalu, pemegang saham menunjuk saya mengendalikan perusahaan ini sebagai direktur utama. “Karena saya anggap kepercayaan itu adalah amanah, maka dengan tekad bulat saya terima tawaran dari para pemegang saham itu,” kisah Erwin.

Lantas, apakah obsesi Erwin sudah tercapai hingga menduduki jabatan direktur utama?

“Kalau Tuhan menghendaki, obsesi saya pingin membuat sebuah perusahaan holding yang membidangi perusahaan pertambangan, perkebunan dan lembaga keuangan. Kemudian perusahaan holding itu diarahkan masuk bisnis perdagangan berjangka komoditi,” harapnya.

Sebagai direktur utama perusahaan pialang berjangka, agaknya Erwin juga memilih hobi yang sesuai dengan jabatannya.

“Jujur, saya ini pencinta sepak bola. Karena saya anak kampung. Tetapi karena usia tidak memungkinkan lagi main sepak bola, maka saya beralih ke futsal, ‘toh sama saja main sepak bola. Yang jadi masalah kalau kita mau main futsal, kekurangan orang. Akhirnya saya tarik diri dari futsal, dan sekarang bermain golf.”

“Lagi-lagi, di golf saya bertemu dengan banyak orang. Dan, saya mencoba memperkenalkan industri ini. Mereka cukup berminat, terutama pada produk-produk tambang. Apa lagi tahun 2014, kebijakan pemerintah membatasi ekspor komoditi tambang, mereka sangat berkepentingan adanya bursa berjangka yang menjamin harga dan ketersediaan komoditi,” tandas Erwin.

Tanpa terasa, jam dinding menunjukkan pukul 09.45 WIB, ponsel Erwin pun sudah berkali-kali berbunyi dihubungi berbagai koleganya. Maka, Redaksi pun menutup pembicaraan. ▲



# Bijak Berinvestasi

